

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan di mana kebutuhan materi, spiritual, dan sosial setiap individu dalam suatu negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan memiliki kemampuan untuk berkembang, sehingga mampu memenuhi peran sosial mereka. Fungsi dari warga masyarakat dapat dilihat dari peran sesuai dengan kedudukannya dalam pencapaian tujuan bersama yang diinginkan oleh masyarakat.

Sebagai negara berkembang Indonesia masih memiliki banyak permasalahan kesejahteraan sosial. Penyandang permasalahan kesejahteraan sosial adalah Masyarakat menengah kebawah yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan memiliki ciri dari masalah sosial yaitu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, korban kekerasan dan diskriminasi dari sekelompok Masyarakat. Berdasarkan riset Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.¹ Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**

¹ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2023"

Gambar 1. 1 Jumlah presentasi penduduk miskin ,september 2012-Maret



(sumber: Badan Pusat Statistik, 26 Februari 2024)

Jika dilihat dari data statistik angka kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan akan tetapi kemiskinan sampai dengan saat ini masih menjadi permasalahan sosial yang belum tuntas. Disisi lain dunia mengatakan bahwa perekonomian Indonesia dari tahun ketahun semakin membaik, dalam artian mengalami peningkatan namun pada kenyataannya masih banyak warga negara yang hidup dibawah garis kemiskinan.²

Adanya permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di Negara ini, maka Negara harus siap dalam menangani setiap permasalahan, melakukan pembenahan dan perubahan melalui proses pembangunan. Pembangunan diartikan sebagai bentuk usaha-usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik guna terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat dalam berbagai

² Kementerian PPN/Bappenas, "Perkembangan Perekonomian Indonesia dan dunia", bappenas.go.id Vol. 6, No. 1, mei 2022.

sektor kehidupan. Selain itu, perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas (SDM) dalam suatu Negara.

Maka dari itu, diperlukan upaya pemberdayaan Masyarakat sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Tantangan ekonomi di Indonesia begitu beragam dan kompleks, sehingga sulit untuk diatasi sepenuhnya. Hal ini terutama terlihat dari masalah besar seperti kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi di beberapa wilayah. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Memberdayakan masyarakat merupakan satu jalan investasi pada masyarakat itu sendiri. Khususnya adalah masyarakat miskin. Sehingga pemberdayaan merupakan suatu keadaan yang menghasilkan sesuatu yang akan dicapai dalam perubahan sosial, yakni masyarakat berdaya, mempunyai kekuasaan, pengetahuan, serta kemampuan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup. Adapun hal yang harus diperdayakan bersifat fisik, sosial, serta ekonomi. Mempunyai rasa percaya diri, mampu berargumentasi untuk menyuarakan pendapat, memiliki pekerjaan, senantiasa berpartisipasi serta sikap mandiri. Mengenai pemberdayaan ekonomi, menurut Suryadi (2019), memberdayakan masyarakat miskin dalam hal ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai program bantuan dan pelatihan kewirausahaan.³

Pemberdayaan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan sosial ekonomi. Ketika masyarakat

³ Suryadi, “Strategi pemberdayaan masyarakat miskin dalam perspektif ekonomi”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12 No. 2, 75-88.

memiliki kontrol atas sumber daya, pengetahuan, dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, mereka cenderung lebih mandiri dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi. pemberdayaan masyarakat juga akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika masyarakat lokal dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, hal ini mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah tersebut. Dengan demikian, memberdayakan masyarakat bukan hanya menguntungkan individu secara langsung, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi dan sosial suatu komunitas. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu terus mendorong dan mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Jika dilihat dari perspektif aturan Islam pada mekanisme pemerintah dalam upaya menggerakan sektor riil, maka salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat miskin adalah melalui implementasi beberapa kebijakan melalui Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen utamanya. Konsep-konsep tersebut telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam dan memiliki potensi besar untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi.⁴

Pertama-tama, Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Implementasi Zakat yang efektif dapat membantu memperbaiki distribusi kekayaan dalam masyarakat dengan menyediakan sumber daya bagi masyarakat

⁴ Ana Nurwahida, “*Manajemen Infaq Sektoral di Bmh Cabang Malang*”, Jurnal Malia, Vol. 7 No. 1, 114-115

miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Infak dan Shadaqah, meskipun tidak diwajibkan seperti Zakat, tetapi tetap memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat. Infak merujuk pada sumbangan sukarela yang diberikan untuk tujuan yang baik, sementara Shadaqah lebih menekankan pada filantropi dan kebaikan hati. Dengan mendorong praktik Infak dan Shadaqah, pemerintah dapat memobilisasi lebih banyak sumber daya untuk memperkuat jaringan sosial dan mendukung mereka yang kurang mampu. Selain itu, Wakaf merupakan konsep menyumbangkan aset produktif seperti tanah atau properti untuk tujuan amal. Penggunaan dana dari Wakaf dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan potensi Wakaf, pemerintah dapat mengembangkan proyek-proyek pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.⁵

Dengan pengimplementasian ZISWAF yang kokoh dan berkelanjutan, diharapkan mampu membawa perubahan nyata terhadap taraf hidup masyarakat, serta mampu mempengaruhi perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju dan berkeadilan. Tindakan ini bukan hanya akan membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, tetapi juga akan memperkuat nilai-nilai solidaritas dan keadilan sosial yang merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam. Adaptasi kebijakan ini tentu memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Potensi positif yang dapat dihasilkan dari implementasi ZISWAF secara menyeluruh sangat besar dan dapat

⁵Nasrulloh, “*Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1, Juni 2019.

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada umumnya penyaluran dana ZISWAF hanya didistribusikan secara konsumtif (digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari). Hal tersebut tentunya kurang berpengaruh atau kurang efektif bagi mustahiq di jangka Panjang maupun dimasa mendatang, maka dari itu muncul pendistribusian dana ZISWAF secara produktif seperti memberikan bantuan modal usaha pada mustahiq. Tentunya hal tersebut akan jauh lebih efektif, bahkan dirasa membantu memberdayakan ekonomi Masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola ZISWAF yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Persiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah DAN Wakaf (ZISWAF) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Persiden melalui Menteri Agama.⁶

BAZNAS mendistribusikan dana ZISWAF secara produktif salah satunya melalui program Bantuan Modal Usaha. Bantuan Modal Usaha merupakan program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pemberian modal usaha yang diperuntukan untuk para mustahik yang memiliki keinginan dan komitmen yang

⁶ BAZNAS Kabupaten Mojokerto “Mengenal jajaran pemimpin BAZNAS Kabupaten Mojokerto”. Baznas kabmojokerto.or.id

tinggi dalam membuka sebuah usaha. Program ini hadir sebagai solusi bagi para mustahik yang menginginkan sebuah modal untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Melalui bantuan modal usaha ini kelak akan mampu untuk menjadikan mustahik mandiri. Bantuan modal usaha ini juga diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan mustahik dan menaikan taraf kehidupan masyarakat menengah kebawah, sehingga melalui program ini mampu untuk meminimalisir masalah ekonomi yang terjadi yaitu masalah kemiskinan yang terus menerus berlanjut.

BAZNAS memiliki strategi yang cukup baik, hal itu dapat dilihat dari banyaknya anugrah yang diterima oleh BAZNAS dari tahun ketahun. Salah satunya BAZNAS berhasil menorehkan prestasi dengan meraih piala Global Islamic Finance Awerd (GIFA) 2020, dimana penghargaan ini merupakan penghargaan level internasional bergengsi bagi dunia keuangan islam. BAZNAS meraih penghargaan sebagai organisasi zakat dunia dengan pendistribusian zakat terbaik 2020. hal ini membuktikan bahwa BAZNAS adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang terpercaya.⁷

Di Kabupaten Mojokerto, BAZNAS baru berdiri pada tahun 2019. Meskipun usianya relatif muda, BAZNAS Kabupaten Mojokerto menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, terutama dalam upaya pemberdayaan mustahik. hal tersebut bisa dilihat dari penerima manfaat program pemberdayaan Bantuan Modal Usaha yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut adalah data penerima manfaat program bantuan Modal Usaha dari 2019-2021.

⁷ BAZNAS, “BAZNAS raih dua penghargaan internasional GIFA Awards 2020”, baznas.do.id

Tabel 1. 2 Penerima Bantuan modal usaha 2019-2021

TAHUN	JUMLAH MUSTAHIK PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA	TOTAL
2020	16 Orang	Rp. 16.000.000
2021	22 Orang	Rp. 22.000.000
2022	50 Orang	Rp. 50.000.000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Mojokerto 2023.

Berdasarkan informasi dia atas, dapat dilihat bahwa penerima manfaat program Bantuan Modal Usaha dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan ini menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk mengetahui strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam Program Pemberdayaan Bantuan Modal Usaha.

BAZNAS Kabupaten Mojokerto memiliki berbagai program untuk memberdayakan mustahik melalui bantuan modal usaha. Beberapa upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam pemberdayaan mustahik yaitu menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha bagi mustahik, termasuk pelatihan keterampilan dan manajemen usaha. Mereka juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penggunaan modal yang baik dan kelancaran usaha. Untuk meningkatkan efektivitas, BAZNAS membentuk kelompok usaha di antara mustahik agar mereka bisa berbagi pengalaman, bekerja sama dalam pemasaran, dan mendapatkan akses ke sumber daya. Selain itu, BAZNAS bermitra dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga

keuangan, dan perusahaan swasta untuk mendukung program pemberdayaan mustahik melalui pelatihan, bantuan teknis, dan akses pasar yang lebih luas.⁸

BAZNAS Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk memberdayakan mustahik melalui bantuan modal usaha yang terintegrasi dengan pelatihan, pendampingan, monitoring, dan kemitraan. Dengan pendekatan yang holistik ini, BAZNAS Mojokerto berharap dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan mustahik di wilayah Kabupaten Mojokerto

Untuk memperdalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan analisis SWOT sebagai alat utama untuk mengevaluasi strategi yang digunakan. Analisis SWOT, yang merupakan akronim dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman), akan memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja strategi. Dengan menganalisis kekuatan, peneliti dapat menyoroti elemen-elemen positif yang memberikan keunggulan kompetitif. Evaluasi kelemahan akan membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perhatian khusus. Peluang akan dieksplorasi untuk menentukan potensi pertumbuhan dan ekspansi, sementara ancaman akan diidentifikasi untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis.

Implementasi analisis SWOT ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang situasi saat ini, tetapi juga membantu dalam merumuskan

⁸ BAZNAS Kabupaten Mojokerto, “Program”, dalam: <https://baznaskabmojokerto.or.id/>

rencana tindakan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Peneliti akan mengumpulkan data melalui berbagai metode, termasuk survei, wawancara, dan analisis dokumen, untuk memastikan bahwa setiap aspek SWOT dianalisis secara komprehensif dan akurat.

Dengan demikian, penggunaan analisis SWOT diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan strategi yang lebih inovatif dan responsif terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis SWOT Strategi Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Bantuan Modal Usaha (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Mojokerto)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemberdayaan mustahik melalui program Bantuan Modal Usaha pada BAZNAS kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana analisis SWOT strategi pemberdayaan mustahik melalui program Bantuan Modal Usaha pada BAZNAS kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Strategi Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Bantuan Modal Usaha Di BAZNAS Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk Mengetahui Analisis SWOT Strategi Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Bantuan Modal Usaha Pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap BAZNAS Kabupaten Mojokerto dan Masyarakat Indonesia, sehingga bisa menunjang pemberdayaan Mustahik.
- b. Dapat dijadikan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah terkait Strategi pemberdayaan Mustahik melalui program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Mojokerto.

2. Praktis

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan sumber referensi bagi mahasiswa yang belajar dalam bidang pemberdayaan mustahik.
- b. Untuk memberikan saran kepada BAZNAS Kabupaten Mojokerto agar dapat meningkatkan pelaksanaan strategi pemberdayaan mustahik dengan lebih baik.

**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**